

**KONSERVASI GLOBAL, TAMAN NASIONAL DAN PRAKTEK LOKAL
DI PULAU SIBERUT, SUMATERA BARAT****DARMANTO**

Environmental Science, UNESCO, Jakarta

E-mail: d.darmanto@unesco.org atau darmantosimaepa@yahoo.com**ABSTRACT**

Siberut Island (West Sumatra) has high profile for conservation. This island of 403,500 ha has endemic species, ecological uniqueness and indigenous peoples assumed to have traditional ecological knowledge. Using ecological politics, this article will describe history of biodiversity conservation in Siberut. Discourse of Siberut conservation influenced by biological crisis narrative in the global context, scientific research and government policy. Conservation discourse was institutionalized during national park establishment in 1993 together with PKAT project and foreign debt from Asian Development Bank. Nevertheless, conservation issue is not easy to implement in the local context and coherent with local practice. Indigenous people of Siberut interpret, articulate and produce meaning for conservation differently with other actors. The relationship between indigenous peoples and conservation issue has been characterized with negotiable features, ambiguity and instability. Meaning negotiation on how resources should be managed by actors with different interests resulted in dilemma of conservation.

Keywords: Conservation, siberut, ecological politic, national park, local practice

INTISARI

Taman Pulau Siberut (Sumatera Barat) dikenal memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Dengan luas 403.500 ha, pulau ini mengandung jenis-jenis endemik (terutama primatanya), keunikan ekologi dan dihuni 'masyarakat adat' yang diasumsikan memiliki pengetahuan ekologi tradisional. Pendekatan politik ekologi dan metode etnografi digunakan untuk memaparkan sejarah dan praktek konservasi Siberut. Wacana konservasi Siberut sangat dipengaruhi narasi krisis biologi global, penelitian ilmiah, dan kebijakan pemerintah. Pemantapan wacana konservasi mewujud dalam pembentukan taman nasional tahun 1993 melalui proyek PKAT dengan dana hutang Bank Pembangunan Asia. Isu konservasi tidak mudah diterapkan dan seringkali tidak sesuai dengan praktek lokal dan pandangan orang Siberut sendiri mengenai bagaimana keanekaragaman hayati seharusnya ditata dan dikelola. Masyarakat Siberut memiliki interpretasi, artikulasi dan memproduksi makna konservasi yang berbeda dengan pegawai taman nasional dan aktor-aktor lain dari luar. Hubungan antara orang Siberut dengan taman nasional diwarnai ciri negosiatif, mendua dan tidak stabil. Negosiasi makna mengenai bagaimana sumberdaya dikelola dari aktor yang berbeda-beda kepentingannya menghasilkan dilema konservasi.

Kata Kunci: Konservasi, Siberut, politik ekologi, taman nasional, praktek lokal

PENDAHULUAN

Merosotnya keanekaragaman hayati dianggap membahayakan kehidupan manusia. Ini menjadikan konservasi keanekaragaman hayati menjadi wacana penting. Wacana konservasi berhasil mengartikulasikan kembali hubungan manusia dan alam serta bagaimana hubungan itu ditata dan dijalankan (Escobar, 1996). Wacana ini mampu mempengaruhi ilmu pengetahuan, budaya, politik dan ekonomi serta pelbagai aktor di dunia. Wacana pelestarian membangkitkan kesadaran baru atas pentingnya sumber daya alam.

Wacana konservasi bukanlah wacana netral dan muncul dari ruang hampa (Escobar, 1998). Wacana konservasi sangat terkait dengan aspek kekuasaan, produksi dan makna, baik ditingkat global maupun lokal (Brosius, 1997). Bagi sekelompok orang, konservasi adalah daftar jenis satwa atau tumbuhan langka. Bagi aktor lain, konservasi adalah upaya menjamin sumber ekonomi dan devisa negara. Sementara, aktor lain mengartikulasikan sebagai cara untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Artikulasi yang berbeda-beda menunjukkan bahwa konservasi adalah ruang terciptanya relasi sosial. Hubungan sosial ini memuat kepentingan berbeda dari pihak yang terlibat. Kepentingan yang berbeda memberi peluang bagi pihak-pihak itu menggunakan kekuasaannya (*power*).

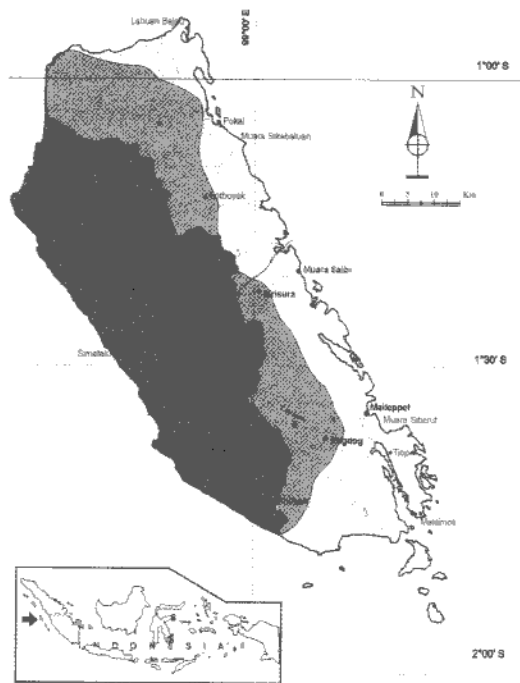
Wacana konservasi dikritik sebagai bias kepentingan negara maju, kepentingan kelas tertentu, dan dapat digunakan untuk memarjinalkan rakyat pedesaan (Blaiki, 1985; Escobar, 1996; Li, 2002). Konservasi bisa menjadi alat hegemoni baru, dimana berbagai aktivis, donor, wakil pemerintah bisa bersepakat bersama (Li, 2001). Namun, platform konservasi belum tentu disetujui masyarakat yang hidup langsung dengan keragaman hayati. Untuk menunjukkan bahwa wacana konservasi terkait

dengan relasi sosial, kekuasaan dan dinamika di tingkat lokal, saya akan mendeskripsikan sejarah konservasi di Pulau Siberut, Sumatera Barat. Penelitian ini fokus pada usaha untuk melacak sejarah konservasi yang terwujud dalam pembentukan Taman Nasional Siberut (TNS). Penelusuran sejarah konservasi Siberut dan kelebagaannya melalui TNS memberi gambaran bagaimana makna, wacana dan praktek konservasi dipersepsikan dan diwujudkan sepanjang waktu.

BAHAN DAN METODE

Lokasi penelitian adalah Pulau Siberut yang terletak 150 km dari pantai Sumatera Barat. Dengan luas 4.030 km², Siberut adalah pulau terbesar yang membentuk Kepulauan Mentawai (Gambar 1). Siberut terpisah dari paparan Sunda sekurang-kurangnya 500.000 tahun lampau. Pemisahan ini menyebabkan flora dan fauna di Pulau Siberut telah berevolusi dan berko-evolusi secara terpisah dari kejadian evolusi daratan Sunda Besar (*Sundaland*). Isolasi ini menghasilkan jenis-jenis endemik dan keunikan ekologi. Pulau ini sangat penting bagi konservasi global dan dijuluki sebagai Galapagos atau Madagaskar-nya Asia (Mittermeier, 2007).

Penelitian ini menggunakan kerangka analisa ekologi politik guna memahami secara mendalam gerakan konservasi alam di level global dan bagaimana prakteknya di tingkat lokal (Blaikie, 1985; Peluso, 2006; Becker, 2001). Kerangka studi ekologi politik mencakup studi empiris dalam konteks lokal dan analisis struktur politik ekonomi yang lebih luas di tingkat regional, nasional dan skala global (Blaikie & Brokfield, 1987; Peet & Watts, 2004). Asumsi penelitian ini adalah: konservasi alam di Siberut hanya bisa dipahami melalui pengkajian interaksi pelbagai aktor di tingkat lokal dan menempatkannya dalam konteks ekonomi politik pada skala yang luas.



Gambar 1. Peta Pulau Siberut. Area yang berwarna gelap menunjukkan kawasan konservasi dengan status taman nasional, sedangkan berwarna agak terang adalah zona transisi untuk cagar biosfer yang meliputi seluruh Siberut dengan kawasan konservasi sebagai zona inti

Saya mengadopsi analisa multidisiplin serta menggunakan berbagai bentuk data baik data sosial maupun biologi dan menekankan pentingnya pendekatan sejarah dan politik dalam masalah konservasi. Saya memulai penelitian dengan menelusuri dokumen dan kajian pustaka konservasi global. Data ini berupa laporan lembaga global (PBB, UNEP, World Bank, Asian Development Bank, WWF) dan artikel mengenai konservasi. Selanjutnya, saya mewawancarai terbuka aktor-aktor lokal, pekerja taman nasional, aktivis konservasi dan LSM di Siberut. Wawancara ini dilengkapi observasi lapangan untuk mengenali kontur geografis dan ekologi pulau ini. Data ini sangat penting untuk memahami dan menganalisis persepsi penduduk Siberut terhadap pelestarian alam. Terakhir, saya mendokumentasikan sejarah konservasi Siberut

dengan menelusuri arsip-arsip dan dokumen tertulis. Data tersebut berupa *project proposals*, *project reports* dari pemerintah, LSM, universitas, laporan penelitian, petisi, opini dan berita di media massa, catatan rapat, dan proseding lokakarya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis biologi dan narasi global

Pada awal dekade 1970-an, wacana konservasi keanekaragaman hayati tumbuh pesat di Eropa Barat dan Amerika. Hal ini dipicu oleh merosotnya keanekaragaman hayati dan hancurnya lingkungan karena pertumbuhan urbanisasi serta praktek-praktek pengambilan sumberdaya alam. Untuk menarik perhatian publik laporan mengenai kerusakan alam ditulis dengan dramatis. Laporan-laporan ilmiah diisi daftar-daftar spesies punah. Televisi menampilkan penggundulan hutan dan laut tercemar. Foto-foto kawasan-kawasan asli yang hilang dilampirkan di media massa. Pembangunan kegagalan revolusi hijau, sistem ekonomi kapitalis dipandang sebagai penyebab utama. Dunia membutuhkan kesadaran baru terhadap lingkungan. Sebagai alternatif, aktivis konservasi, antropolog, ahli biologi, wartawan mencari imajinasi baru mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati yang asli. Fantasi ini tertuju pada masyarakat asli dan wacana kearifan-kearifan tradisional yang dianggap berhasil memelihara alam (Conklin & Graham, 1996; Redford, 1990).

Kesadaran lingkungan menciptakan gerakan pelestarian alam sejak dekade 1980. Lembaga konservasi internasional terbentuk dan aktif memainkan wacana penyelamatan bumi. Gerakan ini menjadi tekanan bagi lembaga pembangunan global-World Bank, Bank Afrika, PBB, FAO-yang dituduh sebagai penyebab krisis lingkungan. Lembaga-lembaga ini mengadopsi kritik-kritik dari gerakan lingkungan. Laporan Brundtland, *Our Common*

Future (1987) dari *World Commission on Environment and Development* (WCED), menandai isu lingkungan masuk ke dalam wacana pembangunan melalui konsep '*sustainability development*'. Laporan memunculkan '*environmental managerialism*' dimana ilmuwan-ilmuwan dan politisi bekerja dengan para administrator dan birokrat untuk peduli dengan bumi (Escobar, 1996). Wacana konservasi global memuncak pada Pertemuan Puncak Rio 1992 (Escobar, 1998). Wacana konservasi semakin melembaga dalam bentuk Protokol Montreal, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan terbentuknya lembaga-lembaga internasional (UNEP, UNCED, TFAP dll.), pusat studi lingkungan di universitas, divisi lingkungan di perusahaan multinasional dan LSM-LSM lingkungan lokal (Brosius, 1997).

Menguatnya wacana pelestarian alam berpengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Di bawah rejim Orde Baru, Indonesia menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Sebagian besar keberhasilan ini berlandaskan eksploitasi minyak bumi, kayu dan hasil alam lainnya melalui penanaman modal asing dan bantuan luar negeri (Schwartz, 1994). Biaya sosial pembangunan dipikul masyarakat pedesaan miskin, yang justru tidak menerima manfaatnya. Lingkungan yang rusak dan masyarakat pedesaan yang miskin menjadi amunisi bagi gerakan sosial untuk bersuara kritis terhadap rezim Orde Baru. Aktivistis pembela hukum dan hak asasi manusia menggunakan narasi keanekaragaman hayati untuk melakukan kritik terhadap penyelenggaraan negara. LSM, mahasiswa, aktivis-aktivis perkotaan membawa isu lingkungan ke tingkat dunia untuk membuka jaringan dan bantuan gerakan lingkungan global (Tsing, 2006).

Status negara *megabiodiversity* membuat Indonesia tersulut wacana konservasi alam dunia. Indonesia mengalami tekanan politik dan memaksa mengubah strateginya dengan mengapresiasi wacana pembangunan berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati (Dauvergne, 1998). Sikap pemerintah ditunjukkan dengan aktif dalam pertemuan konservasi global dan ratifikasi konvensi keanekaragaman hayati. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Direktorat PPA (Perlindungan dan Pelestarian Alam) dibentuk awal dekade 1980-an. Pada tahun 1990, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 5 mengenai Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Kawasan. Sejak UU itu, jumlah kawasan konservasi bertambah. Tahun 1970, terdapat 112 suaka alam (25,163 km²) dan meningkat menjadi 354 (177,521 km²) tahun 1999 (Jepson, 2001).

Siberut dan nilai-nilai konservasi

Proses isolasi Siberut dataran Sunda mendorong terbentuknya fauna yang lebih primitif dibanding fauna Sumatera (McNeely, 1979). Di pulau ini terdapat 65% mamalia endemik yang 58% diantaranya endemik pada tingkat marga dan 10% burung-burungnya endemik (Anonim, 1995). Hewan endemik yang paling dikenal di Siberut adalah empat hewan primata yaitu Bilou atau Siamang Kerdil (*Hylobates klossii*), Bokkoi atau Beruk Siberut (*Macaca siberu*), Simakobu atau Monyet Ekor Babi (*Simias concolor*), dan Joja atau Lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*). Hanya sedikit tempat di dunia dengan luasan pulau kecil yang memiliki primata dengan nilai endemik tinggi dan tidak ada lagi pulau di dunia yang memiliki kepadatan jumlah primata endemik tertinggi kecuali Siberut (WWF, 1980).

Tingginya nilai keanekaragaman hayati Siberut dimulai sejak publikasi ekspedisi ilmuwan Jerman yang dipimpin oleh Kloss (WWF, 1980). Eksplorasi-eksplorasi ilmiah menambah bukti-bukti Siberut memiliki ekosistem yang unik dengan tingkat biodiversitas yang tinggi termasuk sejumlah spesies endemik. Jumlah total flora di pulau ini belum diketahui secara pasti tetapi sekitar 846 spesies, 390 genus dan 131 famili dari pohon, semak dan herba, liana serta epifit telah diketahui. Ada banyak jenis mamalia, burung, reptil, dan amphibi serta ikan dan spesies invertebrata (Anonim, 1995; Mitchell, 1982; WWF, 1980). Tidak diketahui jumlahnya pasti keseluruhan hewan yang ada di Siberut tetapi beberapa penelitian memperlihatkan bahwa beberapa jenis hewan ditemukan dari waktu ke waktu. Tahun 1995 paling tidak 29 jenis mamalia darat dan 4 spesies mamalia laut diketahui, 116 jenis burung, 1 buaya, 2 kura-kura, 3 penyu, 34 ular, 22 kadal, 16 kodok, dan 2 *caecilians* telah tercatat (Anonim, 1995).

Keanekaragaman hayatinya yang luar biasa menyebabkan Siberut menjadi tempat khusus bagi pelestarian lingkungan pada dekade 1980-an karena pada saat yang bersamaan ilmuwan biologi menemukan teori biogeografi (McArthur & Wilson, 1967). Teori ini menjadi tren baru karena mampu menjelaskan karakter 'pulau-pulau' yang terisolasi dan sifatnya yang rentan akan kepunahan jenis-jenisnya. Menurut teori biogeografi, pulau-pulau yang kecil dan terisolasi mendukung jenis spesies yang lebih sedikit dibanding pulau besar atau tidak terisolasi, tetapi mendukung jenis endemik yang banyak. Teori tersebut meningkatkan profil dan nilai penting Siberut.

Bukti-bukti penemuan biologi, temuan geologi, teori-teori biogeografi muncul dalam waktu yang berdekatan dengan publikasi etnografis yang

menyatakan bahwa penduduk Mentawai di Siberut memiliki budaya yang sangat erat terkait dengan alam. Orang Mentawai bahkan dijuluki sebagai '*keeper of the forest*' (Lindsay, 1992). Dalam beberapa laporan terdapat kesan kuat bawah kebudayaan orang Mentawai di Pulau Siberut mendukung usaha pelestarian alam dan bepeluang menciptakan 'surga' yang harmonis tempat hidupan liar bersanding dengan manusia (McNeely, 1979). Kekhasan budaya orang Mentawai ini sedang terancam oleh masuknya proyek pembangunan yang datang dari luar. Penggabungan wacana keterancaman penduduknya dan kepunahan jenis-jenisnya menjadi Siberut sangat berharga dalam gerakan pelestarian alam.

Sejarah konservasi Siberut

Sejarah konservasi Siberut dimulai sebagai reaksi usaha eksploitasi. Tahun 1971, pemerintah menetapkan hampir 300,000 hektar hutan di Siberut sebagai hutan produksi, menyerahkan izin konsesi kepada perusahaan kayu dan hanya menyisakan 6,500 ha Suaka Alam Teitei Bati. Penetapan Suaka Alam Teitei Bati lebih banyak berlaku diatas kertas dan pengelolaan kawasan tidak dilakukan. Masyarakat sendiri tidak peduli--bahkan lebih tepatnya tidak banyak tahu--penetapan ini. Masyarakat tidak mengakuinya secara resmi.

Laporan McNeely (1979) di Jurnal *Oryx* mengawali usaha konservasi yang nyata. Setahun setelahnya, WWF (1980) merilis dokumen '*Saving Siberut: A Conservation Masterplan*' yang didukung IUCN dan Pemerintah Indonesia. Melalui dokumen itu, WWF mengusulkan rencana baru tata ruang dengan membagi Siberut menjadi tiga daerah, 150.000 ha untuk kawasan konservasi, 50.000 untuk kawasan inti cadangan alam dan 100.000 untuk daerah penyangga dan selebihnya untuk daerah

pertanian. Dasar pemikiran WWF bagi usaha konservasi bisa ditilik dari kutipan berikut:

'.....primata yang ada di Siberut bukanlah satu-satunya fauna yang unik di Mentawai; sekitar 65 persen dari mamalia di pulau tersebut endemik....yang tidak kalah menarik adalah masyarakat adat, yang memiliki kebudayaan yang termasuk paling kuno di Indonesia dan masih memegang tradisi yang sesuai dengan tradisi dari Jaman Batu Baru [New Stone Age]. (WWF, 1980).

Tahun 1981, 6.500 ha Cagar Alam berubah menjadi Suaka Margasatwa oleh Menteri Pertanian. Suaka itu diperluas menjadi 56.500 ha (14% dari total luas pulau). Komitmen pemerintah mendapat dukungan internasional, UNESCO menetapkan Siberut cagar biosfer tahun 1981. Pada tahun 1982, Suaka Margasatwa Teitei Bati diperluas menjadi 132.900 ha, atau mencakup hampir 33% luasan Pulau Siberut. Pemerintah juga menempatkan stafnya di Siberut untuk mengawasi Suaka tersebut. Secara rutin mereka melakukan patroli ke Teitei Bati. Mereka juga mendapat dampingan dari peneliti dan WWF. Meskipun demikian, implementasi pengelolaan suaka margasatwa sangat terbatas. Mereka hanya menugaskan 4 orang untuk seluruh Suaka Margasatwa, terlalu sedikit untuk mengawasi kerusakan akibat yang ditimbulkan akibat eksploitasi gaharu dan rotan serta perusahaan kayu. Daerah penyangga tidak jelas batas-batasnya dan usaha serius dari pemerintah pusat mengurus kawasan ini terbatas. Para petugas sendiri tidak mengetahui tata batas. Perluasan kawasan konservasi memperlihatkan posisi pemerintah yang kontradiktif. Di satu sisi, Departemen Kehutanan melegitimasi eksploitasi hutan melalui status hutan produksi, sementara di sisi lain mereka memperluas status hutan konservasi.

Bersamaan dengan usaha konservasi alam, Survival International (SI), sebuah lembaga yang peduli dengan keberlangsungan masa depan kelompok-kelompok pribumi atau minoritas, juga meluncurkan proyek Siberut. Melalui proposal Schefold (1980), proyek ini berusaha mengembangkan perekonomian Siberut berdasar atas pemahaman budaya Mentawai (Persoon, 1985). Proyek SI ini difokuskan untuk mempromosikan kesempatan bagi kelompok pribumi di Siberut untuk menentukan jalan hidup mereka di masa depan. Proyek ini ingin melindungi hak masyarakat Siberut dan ingin membantu dalam proses menghadapi hidup secara modern (Persoon, 1985). Proyek SI dan WWF dipandang sebagai proyek yang saling melengkapi. SI mengembangkan serangkaian kegiatan pengembangan ekonomi, sementara WWF lebih banyak melakukan kampanye pelestarian lingkungan.

Proyek WWF dan SI ini membantu kesadaran global terhadap orang Mentawai di Siberut. Mereka dikesankan penduduk yang memelihara hubungan harmonis dengan alam dan memiliki keinginan kuat melindungi budaya. Pandangan semacam ini digunakan sebagai dasar untuk meletakkan bingkai konservasi. Pandangan ini terwujud dari simbol dan citra *kerei* yang digunakan sebagai ilustrasi bagi kampanye konservasi. Gambar-gambar dukun yang mengenakan cawat dari pohon baiko (*kabit*), bertelanjang dada penuh tato, bunga-bunga di kepala dan manik-manik di leher meluas di media nasional dan publikasi wisata. Citra ini dengan mudah akan dikenali sebagai citra *noble savage* dari jaman batu yang memiliki komitmen melindungi hutan.

Citra tentang *noble savage* tersebut berkait dengan pandangan orang-orang Eropa awal terhadap Mentawai di era kolonial (Wagner, 2001) yang berkonotasi dan berasosiasi dengan alam. Pandangan

ini diturunkan dari perspektif etnolog dan para *traveler* yang menulis penduduk Siberut sebagai *keeper of the forest* (Lindsay, 1992) atau *spirit of the forest* (Ollivier, 1994). Sementara itu, cara hidup mereka akan rusak karena pembangunan, penebangan hutan dan kebijakan negara. Citra orang Mentawai sebagai kelompok minoritas yang rentan karena interaksi dengan dunia luar menjadi narasi yang sesuai dengan narasi krisis keanekaragaman hayati. Pada titik inilah isu penyelamatan lingkungan bertemu dengan isu penyelamatan budaya masyarakat yang terancam terbentuk.

PKAT, taman nasional dan aliansi transnasional

Wacana konservasi Pulau Siberut semakin menguat dekade 1980-an hingga 1990-an. Selain peranan WWF, SI dan lembaga multilateral seperti IUCN dan UNESCO (Mitchell, 1982), LSM nasional, Sekretariat Jaringan Perlindungan Hutan Indonesia (SKEPHI) mulai menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap Siberut pada akhir 1980-an (SKEPHI, 1992). Narasi utama yang ditonjolkan SKEPHI mengenai Siberut sama dengan citraan gerakan konservasi sebelumnya. Pada tahun 1992, mereka mempublikasikan laporan tentang Siberut yang berjudul "*Destruction of World Heritage: Siberut Vanishing Forest, People dan Culture*".

Pada level internasional, *Down to Earth*, LSM berkantor di Inggris menyebarkan surat untuk mendukung konservasi Siberut. Hampir 100.000 surat dikirim dari seluruh dunia. Surat-surat itu ditujukan kepada Kantor Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan dan Departemen Transmigrasi (SKEPHI, 1992). Memenuhi desakan tersebut, Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup saat itu, mengambil peranan penting untuk membuat pertemuan inter-departemen untuk mendiskusikan masa depan konservasi di Siberut. Hasil pertemuan tersebut menyepakati perlunya penyelidikan kondisi

hutan di Siberut. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan dan desakan gerakan konservasi global, melalui surat keputusan presiden Indonesia, pemerintah mengakhiri izin penebangan kayu tahun 1992. Atas keputusan pemerintah Indonesia Asian Development Bank (ADB) setuju memberikan pinjaman senilai 40 juta dolar Amerika kepada pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Proyek Konservasi Alam Terpadu (PKAT) selama enam tahun di Siberut. Melalui proyek PKAT, taman nasional dibentuk, mencakup 190.500 ha daratan Siberut.

Proyek PKAT adalah bagian dari proyek yang luas dari skema *Integrated Conservation and Development Project* (ICDP) yang diterapkan di seluruh dunia (Barber *et al.*, 1994; Wells, Brandon & Hannah, 1992). Konsep dasar proyek ini adalah menyelaraskan pelestarian alam dengan kepentingan masyarakat setempat dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi berbagai masyarakat yang hidup dekat perbatasan kawasan yang dilindungi. Terutama, proyek ini berusaha mengkaitkan konservasi dengan pengembangan ekonomi lokal. Untuk mendukung kegiatan ini, sebuah balai penelitian biologi, antropologi dan ekologi akan dibentuk untuk memberikan dasar bagi penelitian terapan. Agar dukungan proyek ini membesar, ICDP Siberut harus diintegrasikan dengan rencana pembangunan propinsi dan nasional (Barber *et al.*, 1997).

Implementasi proyek PKAT dan pengelolaan Taman Nasional membutuhkan persiapan-persiapan yang tak mudah. Efektifnya, proyek dimulai awal 1995. Proyek PKAT membawa sekitar 24,5 juta dolar (Barber *et al.*, 1997) dari kantor ADB di Manila ke Siberut dan uang itu dibelanjakan untuk membangun kompleks perkantoran. Kantor-kantor itu dibangun sangat megah dengan bahan dari

tembok dan porselen; dilengkapi alat transportasi darat keluaran terbaru, kapal-kapal mewah dan mesin-mesin speedboat. Semua fasilitas tersebut disediakan untuk para pekerja taman nasional yang kebanyakan bukan orang Siberut sendiri dan para konsultan luar negeri. Taman Nasional merekrut pekerja lokal hanya sebagai pegawai rendahan. Untuk ukuran Siberut pada waktu itu, fasilitas perkantoran sangat mewah. Pada waktu itu belum ada satu rumah penduduk--bahkan rumah para pendatang--yang dibangun dari keramik; jalan-jalan berupa jalur setapak dan berlumpur.

Kebanyakan para pekerja tetap taman nasional bukanlah orang Siberut. Sebagian besar mereka berasal dari etnis Minangkabau dan dari Jawa (Jakarta). Sebagian besar pekerja rendahan adalah pindahan dari Balai Konservasi Sumber Daya (BKSDA) yang tidak berprestasi, terlibat masalah dan bermotivasi rendah. TNS dianggap sebagai tempat 'pembuangan' dan hukuman. Karena keterbatasan sumberdaya manusia, proyek ini melibatkan SKEPHI sebagai rekanan untuk implementasi program di lapangan. Proyek ini membutuhkan kerjasama dengan masyarakat Siberut. Proyek PKAT membantu terbentuknya LSM Yayasan Uma Mentawai (YASUMI) sebagai representasi masyarakat Siberut. Kehadiran YASUMI secara eksplisit hal ini memberi sebuah pertanda perbedaan (*mark of difference*) antara masyarakat Mentawai dengan pihak lain.

Penghargaan dan pengakuan global terhadap masyarakat Siberut berkait dengan pergeseran wacana internasional dari konservasi yang berorientasi tunjuk langsung (*top-down*) menjadi berbasis masyarakat (*community based*). Semangat ini dapat dilihat dari dokumen ADB untuk proyek PKAT di Siberut yang secara eksplisit menetapkan tujuan adanya hubungan konservasi

dengan pembangunan ekonomi lokal (ADB, 2001). Bahkan fokus kebijakan PKAT adalah mempertahankan budaya asli dan mengintegrasikannya dengan proyek. Beberapa konsultan menyarankan keikutsertaan dan partisipasi penduduk asli dalam pelestarian dan meningkatkan kemampuannya adalah kunci keberhasilan proyek ini.

Reaksi terhadap taman nasional

Bagi orang Siberut, keputusan pembentukan taman nasional mengubah persepsi masyarakat terhadap negara. Lewat keputusan ini, masyarakat melihat hutan tidak sebagai aset yang dieksploitasi pemerintah. Sambutan masyarakat terhadap taman nasional meriah. Retorika mengenai kesempatan baru akses ekonomi ramai dibicarakan. Mereka melihat YASUMI dan stafnya sebagai bentuk apresiasi negara terhadap orang Siberut dalam pembangunan. Kehadiran taman nasional menguatkan wacana masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat. Dengan cara persuasif, TNS menyatakan di depan publik bahwa tugas utama taman nasional adalah menjaga hutan supaya tidak rusak dan membantu mereka mengatasi penjarahan pihak luar.

Keterlibatan masyarakat dengan proyek diatur melalui perekrutan kader konservasi. Mereka dibayar secara berkala dengan tugas menyampaikan tujuan konservasi di kampung-kampung. Masyarakat mendapatkan pelatihan pertanian, beternak, koperasi dan pengembangan keterampilan. Proyek PKAT berusaha meningkatkan ekonomi melalui pemberian bibit jeruk, rambutan, pinang, kayu manis dan bibit lainnya. Masyarakat diundang dalam pertemuan, mendapatkan konsumsi, akomodasi dan 'uang partisipasi'. Jenis-jenis partisipasi ini meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap taman nasional.

Pelaksanaan proyek PKAT berlangsung ambivalen. Penunjukan taman nasional diikuti penetapan

tata batas dan sosialisasi UU Konservasi. Jumlah polisi kehutanan ditambah dan patroli keamanan diintensifkan. Dengan menggunakan Undang-Undang Kehutanan, eksploitasi tradisional sangat ditekan, dan bahkan pada beberapa kasus dilarang (Darmanto, 2006). Tata batas kawasan konservasi (meskipun secara riil dilapangan sukar ditentukan), pengontrolan dan patroli kehutanan menjadi pelatuk ketegangan taman nasional dan masyarakat. Sosialisasi aturan taman nasional dilaksanakan secara kaku, dengan bahasa hukum yang sesuai dengan ejaan di buku undang-undang, tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

Dengan logika preservasi tahun 1990-an, sosialisasi menyerukan pelarangan aktivitas di kawasan konservasi. Pertemuan-pertemuan kampung diisi dengan ceramah mengenai pelarangan perburuan dan perladangan di zona inti. Pelanggaran akan dihukum dengan ancaman penjara oleh undang-undang. Di sisi lain penjelasan yang kurang memadai mengenai lokasi zona inti, penyangga dan batas-batas pemanfaatan tradisional yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan taman nasional menyebabkan adanya persepsi tanah mereka akan dikuasai taman nasional. Masyarakat berpandangan program taman nasional sebagai penyerobotan lahan. Bahkan secara verbal mereka menyatakan, taman nasional telah merampas hak-hak rakyat. Kesadaran ini menumbuhkan sikap-sikap melawan. Masyarakat, dengan caranya sendiri, merongrong kewibawaan taman nasional melalui protes-protes setengah resmi dengan bahasa yang halus tapi tajam menyindir dalam kegiatan taman nasional.

Ketegangan antara taman nasional dan masyarakat setempat sering berakhir dengan pengusiran

kehadiran staf taman nasional di desa-desa tertentu. Beberapa kegiatan dibatalkan karena masyarakat menolak taman nasional. Kasus-kasus penolakan melalui surat maupun diskusi terbuka sering dilontarkan pasca berhentinya proyek PKAT tahun 1999. Beberapa orang merusak atau memindahkan tanda batas kawasan taman nasional. Beberapa aktivis YASUMI diberi gelar sebagai 'bapaknya para monyet'¹. Polisi kehutanan kesulitan memelihara kontrol pada tingkat lokal ketika masyarakat terus menerapkan perladangan, menebang pohon, mengumpulkan rotan, berburu dan memperjualbelikan produk hutan di kawasan taman nasional.

Masyarakat Siberut tidak menolak keuntungan dari taman nasional. Akan tetapi kompensasi keuntungan ini tidak harus diikuti dengan pelarangan-pelarangan oleh UU. Mereka melihat ada kontras keuntungan dari penetapan taman nasional: pekerja taman nasional--yang kebanyakan orang luar (*sasareu*)--mendapatkan gaji, tempat kerja, dan pelayanan yang dijamin oleh negara sementara masyarakat Siberut yang memiliki klaim terhadap kepemilikan tanah diberi akses terbatas dan hanya sedikit mendapat keuntungan material dari pembentukan taman nasional. Kekecewaan ini mengalihkan isu dimana penduduk Siberut beranggapan bahwa taman nasional hanya peduli pada hewan dan tumbuhan. Mereka hanya ramah kepada para peneliti dari luar Siberut atau berkawan dengan LSM dan kurang peduli terhadap masyarakat.

Akan tetapi keadaan yang sehari-hari tidak sejelas dan sedramatis itu. Banyak kegiatan taman nasional tetap mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan diluar konservasi dan bersifat sosial seperti khitanan massal, pameran produk hasil hutan dan kegiatan amal yang disponsori taman

¹Diceritakan oleh mantan aktivis YASUMI, wawancara Oktober 2008 .

nasional menarik minat orang Siberut. Kegiatan-kegiatan pembinaan petani, distribusi bibit tanaman keras dan pelatihan diikuti dengan santun. Surat-surat dukungan--entah dengan maksud apapun--terhadap taman nasional sepanjang tahun terus mengalir ke ruang kepala taman nasional. Proposal-proposal untuk meminta sumbangan dari masyarakat menumpuk di meja bendahara. Penduduk Siberut melirik peluang-peluang yang menguntungkan, meskipun terbatas, dari interaksi dengan taman nasional.

Beberapa elit penduduk membuat kampanye konservasi lebih sulit. Mereka menghembuskan isu staf taman nasional terlibat perdagangan satwa. Tentu saja ini sulit dibuktikan. Yang lebih sering mereka lakukan adalah membesar-besarkan perilaku yang tidak sesuai antara kehendak dan kebutuhan pribadi petugas rendahan taman nasional dengan UU. Seringkali, staf taman nasional membutuhkan pendapatan lain diluar gaji. Pada saat tertentu, mereka beralih peran tergantung prioritas kerjanya. Kadangkala mereka terlibat dalam pekerjaan penebangan kayu, pertanian kecil-kecilan atau mengkonsumsi hewan buruan. Perilaku ini sering menjadi senjata bagi masyarakat untuk menunjukkan inkonsistensi taman nasional dalam memberlakukan UU.

Proyek PKAT berakhir 20 tahun lebih cepat dengan cara yang buruk: meninggalkan hutang dan membiakkan praktek korupsi. Proyek hanya menyisakan gedung-gedung lengang, semak belukar, kapal-kapal bocor dan aus, mesin speedboat rusak karena tempiasan hujan dan panas dan kantor di Maileppet yang tidak terurus. Beberapa peralatan seperti tenda, mesin tempel, kasur, alat-alat dapur raib, sebagian dijual staf rendahan taman nasional

untuk mencukupi dapur keluarganya. Barang-barang berharga lainnya seperti komputer, radio, antena dan peralatan elektronik rusak dan tidak dipelihara. Dalam dokumen resmi (ADB, 2001), kegagalan proyek PKAT disebabkan beberapa faktor; *pertama*, buruknya pengelolaan keuangan sehingga menyebabkan tingginya tingkat korupsi dalam proyek ini². *Kedua*, kegagalan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Siberut. Meskipun skema peningkatan pembangunan melalui ekonomi dalam proyek ini disiapkan secara rapi dan melibatkan tim ahli, proyek ini tidak dapat meningkatkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Kemungkinan negara untuk mengembalikannya utang dengan bunga pinjaman ADB sebesar 8% sangat kecil. *Ketiga*, kurangnya kapasitas pegawai taman nasional dan YASUMI dalam mengeksekusi pelaksanaan proyek. Skema-skema program hanya bagus di atas kertas dan dokumen resmi (Persoon, 2001).

Kegagalan ini meruntuhkan mental pegawai taman nasional. Kantor pusat taman nasional dipindahkan dari Siberut ke Padang. Pengelolaan dengan pikiran yang goyah dan ketakutan akan mendapat resistensi masyarakat, para pegawai taman nasional lebih banyak menunggu tanpa pekerjaan berarti di kantornya di Padang dan berkunjung ke Siberut apabila ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan di luar gaji pokok.

Dilema konservasi : versi taman nasional dan masyarakat

Bagi isu pembangunan dengan fokus pada ekonomi, Siberut sangat kompleks. Letak geografis dan lemahnya kekuatan ekonomi politik membuat skema yang paling kreatif pun dengan mudah kandas. Orang Siberut gampang menyalahkan taman

²Kasus mengenai korupsi ini bahkan pernah dibawa ke pengadilan tinggi Sumatera Barat. *Puailiggoubat* dan media dari Sumatera Barat (Singgalang) memberitakan proses penyidikan kasus ini dalam terbitannya pada bulan Maret 2002..

nasional untuk semua kesulitan situasi kehidupan yang dihadapi. Hal-hal buruk dari kegagalan negara--pendidikan yang buruk, pelayanan kesehatan dan birokrasi yang macet, harga-harga yang melambung tinggi--ditimpakan kepada taman nasional. Rumitnya konteks sosial, yang sering dengan tidak sengaja diabaikan dalam sebuah proyek menyebabkan tujuan-tujuan yang telah disiapkan dan dikalkulasikan PKAT meleset menjadi alasan bagi kekecewaan. Usaha pengembangan ekonomi PKAT kurang mendapat pengikut karena dirasa tidak menghasilkan pendapatan tinggi. Skema-skema agroforestri yang dirancang hati-hati tidak menjamin kecukupan ekonomi.

Akan tetapi, menyimpulkan program taman nasional gagal juga tidak pada tempatnya. Sebagian bibit tanaman agroforestri (rotan, pinang, cengkeh) berproduksi. Namun, tanaman itu belum menjawab kesulitan ekonomi. Proses asimetri, menjual murah membeli mahal tetap dirasakan penduduk Siberut meskipun mereka telah menanam kayu manis, jeruk, pinang dan rambutan. Produk-produk hutan tersebut harganya sangat rendah. Ini menerangkan posisi penduduk yang rentan terhadap program-program agroforestri karena ekonomi politik global sering tidak sesuai dengan kondisi lokal (Dove, 1993). Problem ekonomi masyarakat Siberut dalam konteks ekonomi global ini tidak bisa diselesaikan oleh taman nasional. Mereka tetap mengalihkan tenaganya untuk membuka hutan dan menanam nilam atau mencari gaharu.

Walaupun pelaksanaan kegiatan taman nasional sering bermasalah, wacana konservasi menyebar dan menjadi bahasa sehari-hari. Retorika nilai keanekaragaman hayati bagi masa depan manusia telah membentuk identitas Siberut. Situasi ini juga paradoks karena terdapat jarak yang jauh antara retorika konservasi dan kebiasaan praktis dalam

kehidupan sehari-hari. Pada tingkat global dan nasional, bagi kebanyakan konservasionis, keanekaragaman hayati adalah salah satu kunci masa depan dunia dan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi pada tingkat lokal keanekaragaman hayati dipahami sebagai daftar-daftar spesies yang dibutuhkan untuk ritual upacara atau kebutuhan subsisten, menjadi salah satu sumber bagi obat-obatan atau diburu untuk alasan-alasan sederhana seperti diet protein. Memasukkan nilai-nilai baru terkait konservasi di tingkat lokal bukanlah hal yang mudah. Bagi para ahli lingkungan, konservasi Siberut menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masa depan. Sementara, masyarakat lokal, wacana konservasi tersebut diterima, diseleksi dan dinegosiasikan dengan pengalaman praktis sehari-hari. Beberapa orang menuntut taman nasional harusnya membangun jalan raya, menyediakan beasiswa sekolah, menyediakan lapangan pekerjaan. Seharusnya taman nasional tidak melarang pengambilan kayu atau penjualan satwa.

Taman nasional sendiri memiliki persepsi yang berbeda terhadap dilema konservasi, pegawainya menyatakan kegagalan ini adalah masalah manajemen. Mereka menganggap bahwa kebijakan taman nasional sangat tepat. Petugas TNS melihat konservasi sebagai masalah implementasi. *Pertama*, mereka melihat adanya kebijakan yang salah dari Departemen Kehutanan dengan mengizinkan beroperasinya perusahaan kayu. Mereka berargumen, tujuan-tujuan konservasi akan mudah diraih jika keseluruhan Pulau Siberut ditetapkan sebagai taman nasional. Masyarakat sering menuntut taman nasional untuk membayar mereka, seperti yang dilakukan pengusaha kayu. *Kedua*, kegagalan konservasi disebabkan masyarakat Siberut belum memahami pentingnya keanekaragaman hayati, tujuan konservasi, dan aturan-aturan mengenai

taman nasional. Mereka juga meyakini bahwa kegagalan konservasi disebabkan karena mentalitas masyarakat lokal. Masyarakat sering disebut *plin-plan* dan tidak memiliki komitmen, kurang berpendidikan dan paling sering adalah dikecam sebagai 'oportunis'³.

Cara pandang taman nasional dalam memahami dilema ini difokuskan secara sempit dan mengabaikan masalah dasar dan sensitif seperti status penguasaan tanah dan klaim akses terhadap hutan. Staf taman nasional tidak melihat kesulitan TNS sebagai persoalan yang berkait dengan klaim terhadap hak akses dan kontrol atas tanah dan sumber daya. Mereka melihatnya pada keterbelakangan budaya dan mentalitas orang Siberut. Para pegawai taman nasional mengalihkan perhatian dari dimensi ekonomi dan kekuasaan dengan mendahulukan dimensi budaya. Landasan berpikir ini membuat pegawai taman nasional keliru menafsirkan konflik menyangkut hak ekonomi dan politik sebagai masalah budaya. Dari pada melihat setiap taman nasional sebagai hubungan yang melibatkan kekuasaan, kebanyakan mereka melihat proses hambatan pembangunan adalah produk dari perbedaan budaya, dimana kebudayaan masyarakat lokal dipersepsikan tidak dapat menjadi landasan pembangunan, dan lebih buruknya lagi sebagai penghambat pembangunan (Dove, 1988).

Pandangan ini melandasi taman nasional untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk 'mendidik' masyarakat. Sosialisasi dipandang obat mujarab mengatasi masalah-masalah taman nasional. Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan keberadaan taman nasional, tujuan konservasi dan masa depan Siberut. Sebaliknya masyarakat melihat usaha 'sosialisasi' ini sebagai upaya yang membosankan. Ini

hanyalah cara bagi taman nasional untuk mencari-cari kegiatan, mendapat gaji dan fasilitas dari negara. Masyarakat merasa mengetahui pentingnya perlindungan konservasi. Yang mereka butuhkan adalah solusi ekonomi. Masyarakat senantiasa mengajukan pertanyaan berulang seperti ini: Apa tujuan taman nasional dibentuk? Kenapa Siberut dijadikan taman nasional? Bisa dipastikan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan retorik, cara menguji dan merongrong staf taman nasional yang datang melakukan kegiatan di tempat mereka. Cara ini adalah sebuah strategi yang digunakan untuk menyindir taman nasional. Ini adalah tindakan yang hampir setara dengan sebuah kerlingan halus yang sangat sesuai dengan istilah 'kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu'.

KESIMPULAN

Melihat sejarah Siberut, kita bisa memahami dinamika konservasi ditingkat global dan bagaimana penerapannya ditingkat lokal. Mengatakan bahwa penduduk Siberut tidak terpengaruh--kalaupun dikatakan tidak mendapatkan manfaat--dari wacana konservasi bukan hanya pernyataan sembarangan, tetapi juga konklusi yang keliru. Wacana konservasi membentuk identitas Siberut dan masyarakatnya secara sosial pada tingkat lokal maupun global. Konservasi membantu promosi masyarakat Siberut sebagai masyarakat asli yang memelihara lingkungan dan membantu menghilangkan stereotip negatif sebagai masyarakat terasing atau perusak hutan. Citra sebagai masyarakat yang dekat dengan hutan dan memiliki rahasia dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi identitas yang mengalami internalisasi bagi orang Siberut sendiri. Identitas ini menjadi sangat penting ketika orang Siberut ber-

³Focus group discussion antara pegawai taman nasional, kepala balai taman nasional dan penulis pada Juni 2006.

hadapan dengan komponen luar. Penduduk Siberut dapat memanfaatkan identitas masyarakat dekat dengan hutan dan memosisikan dirinya sebagai bagian konservasi global. Oleh karena itu mereka tidak menolak kalau dilibatkan sebagai kader-kader konservasi dan dikirim dalam pertemuan-pertemuan penting konservasi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya untuk menari, berpakaian tradisional, dan menunjukkan dirinya sebagai masyarakat tradisional yang pro-konservasi.

Konservasi adalah satu-satunya wacana yang menggabungkan seluruh komponen global, nasional ke dalam proses lokal. Pembentukan taman nasional membenihkan wacana aktivisme masyarakat sipil di Siberut dan Kepulauan Mentawai dengan membantu lahirnya LSM lokal. Konservasi juga membuat perhatian dunia, mengubah wajah negara dan mengubah persepsi masyarakat lokal terhadap sumberdaya. Namun hal ini pun kadang bersifat paradoks. Elit-elit lokal dan kader konservasi yang mendapatkan pelatihan taman nasional sering menjadi aktor untuk menolak konservasi dan taman nasional. Hubungan antara masyarakat, elit-elit Siberut dan isu konservasi diwarnai oleh aliansi yang tidak solid dan sangat cair. Ini merefleksikan dinamika kepentingan yang saling bertemu, bertatap muka, saling mengingkari dan juga mengkhianati.

Menghadapi rongrongan dan pasang surut interaksi dengan agen-agen yang lain, dinamika agen-agen konservasi juga berubah. Taman nasional bertransformasi. Mereka terdiri dari staf-staf yang memiliki harapan, ide dan cita-cita tersendiri. Sebagian dari mereka juga belajar tentang isu diluar persoalan konservasi. Wacana internal mereka juga digerakkan dan dibentuk dari negosiasi dengan para agen lain ini. Relasi dengan lembaga lain (UNESCO, LSM) telah membentuk taman nasional yang tidak tunggal. Visi dan misi taman nasional secara resmi

dan eksplisit mencantumkan kata seperti kemitraan dan partisipasi masyarakat (Anonim, 2005). Hasil interaksi tersebut menjadikan TNS secara resmi--sekurang-kurangnya dari pernyataan kepala dan pejabat seniornya--mengakui klaim hak ulayat masyarakat Mentawai, meskipun hal ini tidak akan pernah bisa secara eksplisit dilontarkan kepada pejabat Departemen Kehutanan yang lebih tinggi di Jakarta. Mereka mengakui adanya hak-hak masyarakat Mentawai yang hidup turun-temurun dan menempati kawasan konservasi sebelum taman nasional. Pengakuan itu menyebabkan--selain dikarenakan pengawasan yang lemah (lebih sering alasannya karena dana sangat terbatas dan akses ke kawasan taman nasional sangat sulit dan mahal)--TNS mentolerir praktek pemanfaatan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Wacana warga Siberut sebagai penduduk yang memiliki kearifan tradisional digunakan taman nasional dalam pertemuan resmi untuk menunjukkan sikap kolaboratifnya dengan masyarakat sekaligus untuk menutupi lemahnya manajemen mereka dalam menerapkan aturan kehutanan.

Akan tetapi pengakuan tersebut juga bersifat paradoks. Secara tegas dan berulang-ulang para pegawai taman nasional bersemangat mengenai visi taman nasional yang mengakui 'masyarakat adat', 'pengetahuan tradisional', 'kearifan budaya', akan tetapi pengakuan ini tidak pernah tuntas. Taman nasional hanya menolerir praktek-praktek perburuan dengan panah, perladangan tanpa teknologi dan dalam luasan yang sempit, dan pengambilan-pengambilan hasil hutan, terutama kayu, untuk kebutuhan subsisten. Sementara pengambilan hasil hutan di kawasan taman nasional untuk kepentingan komersial dan mencukupi kebutuhan ekonomi mereka tetap tidak mendapatkan pengakuan dan izin. Pembukaan kawasan hutan untuk jalan raya

dipandang tidak sah oleh taman nasional. Ini, sekali lagi menegaskan posisi rentan masyarakat. Pengakuan ini menekankan pada aspek konservasi alam dalam kerangka kehutanan, dengan masyarakat tradisional sebagai pesertanya (Li, 2001).

Konservasi alam menjadi kompleks ketika bertemu dengan sejarah lokal dan kepentingan yang berbeda dari aktor-aktor atau situasi sosial. Makna konservasi harus mengalami negosiasi ditingkat lokal. Negosiasi yang dilakukan orang Siberut sangat canggih: Pekerja taman nasional tahu penduduk melanggar undang-undang dengan memasuki kawasan, penduduk paham mengenai hal ini. Penduduk Siberut juga tahu bahwa taman nasional tidak bekerja maksimal, lebih banyak tinggal di Padang bersama keluarganya sehingga tidak berani menerapkan UU konservasi, dan tentang hal ini, petugas taman nasional memahami. Petugas taman nasional tahu bahwa banyak praktek melanggar konservasi terus berlangsung, mereka sangat hati-hati melihatnya. Ini masyarakat tahu. Sebaliknya, penduduk Siberut terus mengusahakan klaim hak ulayatnya, dan taman nasional menghargainya, ini semua orang tahu.

Yang berjalan di Siberut dalam keseharian menyangkut konservasi adalah hal-hal sederhana dan konkret. Jikalau pekerja taman nasional datang, penduduk akan melayani dengan baik ramah. Mereka berharap ada kegiatan menguntungkan. Petugas taman nasional membutuhkan masyarakat sebagai 'target sasaran' kegiatan agar programnya mendapatkan legitimasi--melalui selebar tandatangan, stempel kepala desa atau cap jari kehadiran atas suatu kegiatan. Kalaupun ada pertanyaan retorik dan membosankan beserta jawabannya yang klise dan sudah dikenali logikanya mengenai taman nasional, masing-masing pihak tidak begitu memperlmasalahkan. Masyarakat tahu, petugas taman nasional tidak

akan berani melakukan tindakan kasar seperti melakukan pengusiran. Petugas pun tahu, sehebat apapun sindiran dan gugatan, mereka tetap diterima. Masyarakat pun tahu, petugas taman nasional akan tetap datang ke Siberut untuk melakukan patroli atau membagi bibit tanaman. Masa depan konservasi dan kelanggengan taman nasional, agaknya, ditentukan oleh daya tahan petugas dan aktivis-aktivisnya dalam menghadapi resistensi masyarakat sehari-hari ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya berterima kasih kepada Bill Watson, Tania Li, dan Munawir yang membaca draft awal naskah ini. Abidah B. Setyowati dan Hery Santoso menyumbang diskusi. Juga kepada pengulas anonim jurnal ini yang membuat naskah menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1995. Siberut national park integrated conservation and development management plan (1995-2020). Volume II: action plan for conservation and development. Chemonics International, PT. Indeco Duta Utama and PT. Nadya Karsa Amerta, untuk Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan, Republik Indonesia, Jakarta.
- Barber CV, Afif S, & Purnomo A. 1997. *Meluruskan Arah Pelestarian Alam Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Becker LC. 2001. Seeing Green in Mali's Woods: Colonial Legacy, Forest Use Local Control. *Annals of the Association of American Geographers* **91**, 504-526.
- Blaikie P. 1985. *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*. Longman, London.
- Blaikie P & Brookfield H. 1987. *Land Degradation and Society*. Methuen, London.
- Brosius JP. 1997. Green dots, pink heart: displacing politic from the Malaysian rain forest. *American Anthropologist* **101**: 36-57.

- Concklin B & Graham L. 1995. The shifting middle ground: Amazonian Indians and Eco-Politics. *American Anthropologist* **97**: 695-710.
- Darmanto. 2006. Krisis klaim kepemilikan hutan di pulau Siberut. *Wacana* **20**: 157-182.
- Dauvergne P. 1998. Environmental insecurity, forest management, and state responses in south east Asia. *Environmental Conservation* **25** (1): 30-36.
- Dove M. 1993. A revisionist view of tropical deforestation and development. *Environmental Conservation* **20**: 1, 17-24, 36.
- Dove M. 1988. Peranan Kebudayaan Tradisional Dalam Pembangunan. Dalam M. Dove (ed.). Hlm.1-39. Yayasan Obor, Jakarta.
- Escobar A. 1998. Whose knowledge, whose nature? biodiversity, conservation and the political ecology of social movements. *Journal of Political Ecology* **5**: 53-82.
- Escobar A. 1996. Constructing nature: element for a poststructural political ecology. Dalam R. Peet dan M Watts (ed). Hlm. 46-68. Routledge, London.
- Jepson P & Whittaker RJ. 2002. Histories of Protected Areas: Internationalization of Conservationist Values and Their Adoption in the Netherlands Indies (Indonesia). *Environment and History* **8**: 129-172.
- Lindsay C. 1992. *Mentawai Shaman: Keeper of The Rainforest*. Aperture, New York.
- Lelievre O. 1994. *Mentawai: La foret de Esprit*. Anako Publication, Paris.
- Li TM. 2002. Engaging simplification: community-based resources management, market process, and states agendas in uplands South East Asia. *World Development* **30**: 265-283.
- Li TM. 2001. Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia's forest zone. *Modern Asia Studies* **35**: 645-676.
- Loeb E. 1972. *Sumatera: Its History and Peoples*. Oxford University Press, Singapore. Hlm. 158-192.
- McArthur RH & Wilson EH. 1967. *The Theory of Island Biogeography*. Princeton University Press, New York.
- McNeely JA. 1979. Siberut: island paradise for wildlife and people. *Oryx* **2**: 159-165.
- Mittermeier R. 2007. *Siberut Galapagos Asia*. Tropica, 7-16.
- Peluso NL. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa*. KONPHALINDO, Jakarta.
- Persoon GA. 2001. The management of wild and domesticated forest resources in Siberut, West Sumatra. *Jurnal Antropologi Indonesia, Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology* **64**: 69-83.
- Persoon GA & Schefold R. 1985. (ed.). *Pulau Siberut: Pembangunan Sosio-Ekonomi, Kebudayaan Tradisional dan Lingkungan Hidup*. Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Persoon GA & Van Beek HH. 1997. Uninvited guest: tourist and environment on Siberut. Dalam V. King (ed.). Hlm. 317-334. Curzon, London.
- Peet R & Watts M. 1996. *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movement*. Routledge, London. Hlm. 1-45.
- Redford K. 1990. The ecologically noble savage. *Orion Nature Quarterly* **9**: 25-29.
- Schwartz, A. 1994. *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. Allen and Unwin, St Leonards, Australia.
- Schefold R. 1980. The Siberut Project, *Survival International Review* **5**: 4-12.
- SKEPHI. 1992. *Destructing of The World's Heritage: Siberut Vanishing Forest, People and Culture*. SKEPHI, Jakarta.
- Tsing AL. 2006. *Friction: an Ethnography of Global Connection*. Princeton University Press, New Jersey.
- Wells M, Brandon K & Hannah L. 1992. Peoples and Park: Linking Protected Areas Management With Local Community. World Bank/WWF/USAID, Washington D.C.
- Wagner W. 2002. The Mentawaian sense of beauty: perceived through western eyes. *Indonesia and the Malay World* **31**: 199-220.
- WWF. 1980. *Saving Siberut: a conservation masterplan*. World Wide Fund, Bogor.